

ANTARA BALI

Membangun Karakter Masyarakat Berbasis Pengetahuan



INDUSTRI BATOK KELAPA WAKILI KLUNGKUNG KE TINGKAT NASIONAL



WAGUB MINTA
MASUKAN REKTOR
SINERGIKAN
TEKNOLOGI-WISATA
BUDAYA
Hal. 2



APLIKASI
"IBADUNG"
ATASI KEKURANGAN
BUKU DI SEKOLAH
Hal. 9

HAL 14

Pemprov Bali Atur Ulang Penempatan Lebih 5.000 Tenaga Kontrak

Pemerintah Provinsi Bali akan menata atau mengatur kembali penempatan lebih dari 5.000 tenaga kontrak di lingkungan pemprov setempat, disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan dan kebutuhan tiap organisasi perangkat daerah.

“Saat ini kami sedang mapping, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa dilaksanakan ‘rolling’ tenaga kontrak itu,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali I Ketut Lihadnyana di Denpasar, Kamis.

Untuk pemetaan (mapping) tenaga kontrak, lanjut Lihadnyana, semuanya ditangani BKD Bali karena pihaknya yang mengetahui apa yang menjadi kebutuhan di masing-masing OPD.

“Rolling dalam artian penempatan tenaga kontrak

disesuaikan dengan kualifikasi pendidikannya. Misalnya, biar tidak nanti sarjana peternakan, tetapi ditempatkan di Dinas Kesehatan,” ucapnya.

Dengan adanya penataan tenaga kontrak, kata Lihadnyana, sekaligus untuk mendukung program kegiatan di masing-masing OPD agar dapat berjalan lebih efektif, cepat dan cermat. Jangan sampai di satu OPD kelebihan, sedangkan di OPD yang lain kekurangan tenaga kontrak.

Terkait dengan masalah menumpuknya tenaga kontrak, ujar Lihadnyana, tidak bisa hanya dilihat dari jumlahnya yang banyak, tetapi tergantung dari beban kerja dari OPD bersangkutan.

“Seperti di BKD, karena sekarang semua berbasis digital, kan tidak terlalu banyak kami

membutuhkan tenaga kontrak, paling-paling hanya tukang kebun, petugas kebersihan. Dengan digitalisasi berakibat mengefektifkan SDM,” ucapnya.

Lihadnyana menegaskan, aparatur birokrasi di Provinsi Bali memang harus dilakukan penataan kembali dari aspek kualifikasinya, kompetensinya, sehingga menjadi tenaga yang berkinerja.

“Selama ini, kami juga membuat penilaian atas kinerja aparatur secara terukur. Orang yang memiliki kinerja yang baik yang bisa bersaing. Oleh karena itu, ASN atau birokrasi di Pemprov Bali dalam konteks menapaki jenjang karirnya ditentukan oleh mereka sendiri,” kata mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali itu. (ant)



Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali I Ketut Lihadnyana (Antaraneews Bali/Ni Luh Rhismawati/2019)

Wagub Minta Masukan Rektor Sinergikan Teknologi-Wisata Budaya



Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati saat menyampaikan sambutan pada Malam Apresiasi Hakteknas ke-24 (Antaraneews Bali/Ni Luh Rhisma/2019)

Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati meminta para rektor dari berbagai perguruan tinggi dapat memberikan masukan kepada pemprov setempat terkait kiat untuk menyinergikan kemajuan teknologi dan menjaga Bali sebagai destinasi wisata budaya.

“Pariwisata budaya itu sangat sensitif. Kami berharap para rektor dapat memberikan masukan agar di satu sisi destinasi Bali sebagai wisata budaya bertahan, di sisi lain bisa mengadopsi ke-

majuan-kemajuan zaman, khususnya di bidang teknologi,” kata Wagub yang akrab dipanggil Cok Ace itu dalam Malam Apresiasi Hakteknas ke-24 di Kampus ISI Denpasar, di Denpasar, Selasa malam.

Pemerintah Provinsi Bali sendiri, lanjut Cok Ace, berkomitmen untuk menjadikan Bali sebagai “smart province” yang telah dimulai dengan memasang akses wifi secara gratis pada seluruh desa adat di Pulau Dewata.

Harapannya, selain akses in-

ternet bisa dinikmati masyarakat hingga pelosok-pelosok desa, juga untuk membantu akses pasar hasil-hasil produksi.

“Selain itu, kami juga tengah mengkaji penggunaan energi matahari sehingga harapannya menjadikan Bali sebagai daerah dengan energi bersih bisa terwujud. Kami pun saat ini tengah menyusun pergub tentang kendaraan listrik,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengatakan bahwa kuantitas riset dan publikasi yang terus meningkat itu saja tidak cukup.

Yang lebih penting, menurut Nasir adalah hasil riset dan publikasi, kemudian bisa menghasilkan prototipe dan inovasi yang bisa bermanfaat bagi masyarakat, atau adanya hilirisasi dan komersialisasi hasil-hasil riset pada dunia usaha.

Terkait dengan “startup”, Nasir mengatakan dalam lima tahun ini jumlahnya telah meningkat drastis menjadi sebanyak 1.350, yang terlahir berkat kerja

sama berbagai komponen seperti perguruan tinggi, pemerintah hingga kalangan swasta. Padahal sebelum dirinya menjabat Menristekdikti, startup yang muncul di bawah 15.

“Kami berharap dengan kegiatan Hakteknas yang dipusatkan penyelenggaraannya di daerah-daerah, dapat terus mendorong lahirnya inovasi di daerah,” ujarnya.

Kepada para penerima berbagai anugerah inovasi dan iptek, Nasir berharap agar dapat menginspirasi daerah lain maupun penerima lainnya.

Selain penyerahan anugerah iptek dan inovasi, dilaksanakan pula Penyerahan Penghargaan Perguruan Tinggi yang menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam rangka memotivasi dan mendorong tumbuhnya budaya mutu di perguruan tinggi.

Diberikan pula penghargaan terkait Lomba Penulisan, Foto dan Vlog Untuk Iptek Inovasi kategori Wartawan dan Non Wartawan/Umum. (ant)

Gubernur Ingin 70 Persen Hasil Dermaga Tanah Ampo untuk Karangasem



Gubernur Bali Wayan Koster, Dirjen Hubungan Laut Kemenhub Agus Purnomo dan Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri menunjukkan nota kesepahaman terkait Dermaga Tanah Ampo yang telah ditandatangani (AntaraneWS Bali/Dok Humas Pemprov Bali/2019)

Gubernur Bali Wayan Koster berharap sekitar 70 persen hasil operasional Dermaga Tanah Ampo yang dilanjutkan pembangunannya, dapat dinikmati Pemerintah Kabupaten Karangasem.

“Dermaga Tanah Ampo yang dari dulu tidak selesai-selesai saya anggap penting dalam rangka mengintegrasikan infrastruktur di Bali,” kata Koster dalam acara penandatanganan nota

kesepahaman antara Kementerian Perhubungan, Pemprov Bali dan Pemkab Karangasem terkait Pembangunan Pelabuhan Tanah Ampo, di Denpasar, Selasa.

Ia menyebutkan sudah ada lampu hijau dari Presiden Joko Widodo. Menteri juga sudah melihat langsung sehingga tahapannya harus diselesaikan agar secepatnya terlihat progres dari proyek itu.

Menurut Koster, kelanjutan

pembangunan dermaga bertaraf internasional di wilayah Kabupaten Karangasem yang berada di ujung timur Pulau Bali itu adalah sebagai bentuk keseriusan komitmen pemerintahannya mewujudkan visi pengembangan infrastruktur terintegrasi darat, laut dan udara.

Gubernur kelahiran Desa Sembiran, Buleleng ini berharap kelanjutan pembangunan dermaga bertaraf internasional di kawasan Tanah Ampo akan berdampak terhadap pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Karangasem.

“Kami di provinsi tidak minta banyak, biar Kabupaten Karangasem yang lebih banyak menikmati hasilnya, sampai 70 persen tidak masalah jika sudah beroperasi nanti. Karena tugas kita juga di provinsi untuk membantu meningkatkan perekonomian di daerah seperti Karangasem,” ucapnya.

Namun, Koster mengingatkan ke depan pengelolaan dermaga yang ditujukan sebagai

salah satu infrastruktur penunjang pariwisata Bali ini dilakukan secara profesional.

“Selama ini ada anggapan kita hanya bisa membangun, dan tidak bisa memelihara. Harus dihilangkan anggapan itu, dikelola secara baik, profesional sehingga bisa betul-betul memberikan manfaat bagi masyarakat luas, terutama di Karangasem,” ucapnya.

Selanjutnya terkait sistem pembangunan dermaga yang akan mengakomodasi kapal pesiar dari mancanegara ini akan menggunakan pola kerja sama antara pemerintah pusat, daerah dan swasta. “Saya lihat desainnya bagus sekali,” ucap mantan Anggota DPR RI tiga periode ini.

Sementara itu Direktur Jenderal Hubungan Laut Kemenhub Agus Purnomo mengatakan pembangunan Dermaga Tanah Ampo telah berjalan sesuai tahapan dan rencana. Kemenhub sendiri, menurutnya, akan memberi dukungan penuh terhadap proyek ini. (ant)

Gubernur Ajak Para Senator Dukong Pembangunan Bali

Gubernur Bali Wayan Koster mengajak para senator asal Bali untuk bersama-sama dengan pemerintah provinsi setempat mendukung pembangunan lima tahun ke depan guna mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

“Mari bersama-sama dukong pembangunan di Bali guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali,” kata Koster saat menerima Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dapil Bali terpilih periode 2019-2024 di Denpasar, Senin.

Tampak anggota DPD RI Bali terpilih yang hadir yakni Shri IGN Arya Wedakarna MWS, Made Mangku Pastika dan H Bambang Santoso yang didampingi Kepala Kantor Daerah DPD RI Provinsi Bali.

Jelang pelantikan anggota

DPD dan DPD RI pada tanggal 21 Oktober 2019 mendatang, anggota DPD RI periode 2019-2024 dan Gubernur Bali Wayan Koster berkomitmen untuk berkomunikasi secara intens dan saling mendukung dalam melaksanakan pembangunan di Bali.

Untuk mendukung kinerja dan mempermudah administrasi, anggota DPD RI Shri IGN Arya Wedakarna MWS mewakili anggota DPD RI Bali periode 2019-2024 berharap kantor daerah DPD RI Provinsi Bali yang berada di Jalan Cok Agung Tresna, Denpasar, yang merupakan aset Pemerintah Provinsi Bali agar bisa dihibahkan.

Selain itu, anggota DPD RI Dapil Bali juga berkomitmen mengawal RUU tentang Provinsi Bali. “Untuk kelancaran tugas, kami juga berharap mendapat



Gubernur Bali Wayan Koster didampingi tiga senator terpilih asal Bali (AntaraneWS Bali/Dok Humas Pemprov Bali/2019)

dukungan dari Pemerintah Provinsi Bali untuk meminjam tempat, misalnya (Gedung-red) Wiswa Sabha,” ucap Wedakarna.

Gubernur Koster secara prinsip setuju dengan rencana hibah Kantor Daerah DPD RI Bali di Jalan Cok Agung Tresna. “Ting-

gal minta persetujuan DPRD saja,” kata Ketua DPD PDIP Provinsi Bali ini.

Ia juga mempersilahkan anggota DPD RI untuk menggunakan tempat milik Pemprov Bali untuk kelancaran tugas anggota DPD RI Bali periode 2019-2024. (ant)

Pemkot Denpasar-Kedubes Inggris adakan “English for Schools”



Pemkot Denpasar-British Embassy menyelenggarakan sosialisasi “English for Schools” . (ANTARAI/Komang Suparta/IST/2019)

Pemerintah Kota Denpasar, Bali bekerja sama dengan Kedutaan Besar Inggris mengadakan sosialisasi English for Schools melibatkan para guru bahasa Inggris SD hingga SMA se-Kota Denpasar dalam proses peningkatan kualitas mengajar, sekaligus promosi kepariwisataan.

Asisten III Setda Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat pembukaan acara

tersebut di Denpasar, Jumat, mengatakan Denpasar selain merupakan kota yang mendukung pariwisata juga memiliki visi mengembangkan industri kreatif, karena itu perlu peningkatan pembelajaran bahasa asing, salah satunya Bahasa Inggris.

“Sosialisasi penguasaan bahasa asing, khususnya Bahasa Inggris sangat perlu ditingkatkan, karena itu penguasaan

bahasa asing dimulai dari para guru dari tingkat SD hingga SMA. Dengan demikian diharapkan mampu juga meningkatkan kemampuan berbahasa asing di kalangan pelajar di Kota Denpasar,” katanya.

Langkah tersebut, kata dia, sebagai penjabaran dalam misi yang bertujuan untuk menguatkan jati diri masyarakat Kota Denpasar berdasarkan kebudayaan, kearifan lokal Bali yang berlandaskan kepada filosofi “Tri Hita Karana” (keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan).

“Perkembangan Kota Denpasar sangatlah cepat utamanya dalam sektor ekonomi kreatif. Hal ini tentunya memerlukan penguasaan bahasa asing khususnya Bahasa Inggris sebagai sarana dalam proses mempromosikan kekayaan alam, seni budaya dan kreativitas masyarakat Kota Denpasar,” ujarnya.

Dikatakan dia, seluruh masyarakat Kota Denpasar harus belajar menguasai bahasa asing khususnya Bahasa Inggris sebagai sarana mengembangkan industri kreatif dan menjadi motor penggerak perekonomian sehingga Kota Denpasar tidak hanya bertumpu pada satu sektor saja, yakni sektor pariwisata.

Oleh karena itu perkembangan Denpasar yang terus berinovasi ini memerlukan masyarakat yang cepat beradaptasi, mencari solusi imajinatif serta penuh ide untuk mengembangkan strategi baru.

“Kami berharap kehadiran sosialisasi ‘English for Schools’ sebagai program inovasi menuju ‘Denpasar to The World’ akan membagi informasi mengenai kurikulum mengembangkan model pendidikan Bahasa Inggris menjadi lebih aktif dan menyenangkan untuk siswa,” ucapnya. (ant)

Pemkot Denpasar Jalin Kerja Sama Bank BPD Bali dan BPN

Pemerintah Kota Denpasar menjalin kerja sama dengan dua instansi, yakni Bank BPD Bali dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), melalui nota kesepahaman untuk upaya transparansi dan mencegah praktek-praktek korupsi.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan Wakil Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma, dan Kepala BPN Kota Denpasar Sudarman Harjasaputra di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Rabu.

Penandatanganan nota kesepahaman yang secara keseluruhan berjumlah 29, dan diselenggarakan secara serentak antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota se-Bali ini disaksikan Pimpinan KPK RI, Basaria Panjaitan, dan Gubernur Bali Wayan Koster.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Kejati Bali

Kepala Kajari Denpasar, Bupati se-Bali, Pimpinan OPD terkait di seluruh Bali, serta instansi vertikal di lingkungan Pemprov Bali serta kabupaten dan kota se-Bali.

Adapun secara khusus Pemerintah Kota Denpasar turut menandatangani dua nota kesepahaman, yakni Nota Kesepahaman Nomor 415.4/14/Kb/BKS/2019 dimana Pemerintah Kota Denpasar dengan Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar tentang Pemanfaatan dan Pengamanan Tanah Penguasaan Pemerintah Kota Denpasar dan Nota Kesepahaman Nomor : 415/12/KB/BKS/2019 dimana Pemerintah Kota Denpasar bersama Bank BPD Bali bekerja sama tentang Pemantauan dan Penerimaan Pajak Daerah Secara Elektronik Melalui Fasilitas Bank Persepsi.

Pimpinan KPK RI Basaria Panjaitan dalam sambutannya menekankan bahwa Nota Kesepahaman merupakan wujud komitmen bersama untuk



Pemkot Denpasar melakukan menandatanganan nota kesepahaman dengan Bank BPD Bali dan BPN Denpasar. (Antaraneews Bali/Komang Suparta/IST/2019)

diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dimana hal ini secara khusus dilaksanakan dengan menyoal optimalisasi pajak daerah dan pengelolaan aset yang baik sebagai upaya pencegahan korupsi.

Hal tersebut sesuai dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Melalui Perpres Nomor 54 Tahun 2018 yang diamanat-

kan kepada pemerintah pusat hingga daerah. Terdapat tiga fokus pencegahan korupsi yang diamanatkan dalam Perpres tersebut. Yakni Perizinan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tata Kelola Manajemen Aset, dan Keuangan Negara. Hal ini lah yang diwujudkan dengan upaya pencegahan melalui peerapan E-Planning dan E-Budgeting yang terkoneksi. (ant)

KPK : Tahun 2019, Kota Denpasar Nihil Gratifikasi



Penasehat KPK, Budi Santoso saat memberikan sambutan dalam acara KPK Roadshow yang berlangsung di Gedung Ksiarnawa, Art Center, Denpasar yang dihadiri oleh Pemerintah Provinsi dan juga pelajar, Jumat (16/8). (Antara/Ayu Khania Pranisitha/2019)

Penasehat KPK, Budi Santoso menjelaskan saat ini KPK hanya menerima satu laporan yang terkait gratifikasi pada tahun 2018, sedangkan di tahun 2019 belum ada laporan terkait gratifikasi tersebut, namun tetap dilakukan evaluasi terhadap pengelolaan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) untuk dapat berjalan baik.

“Hingga saat ini KPK baru menerima satu laporan yang ter-

kait dengan gratifikasi untuk tahun 2018, sedangkan untuk tahun 2019 belum ada laporan gratifikasi yang diterima, oleh karena itu KPK terus melakukan evaluasi dan berharap pengelolaan PPG ini bisa berjalan dengan baik dan menjadi perhatian Pemerintah Kota Denpasar,” kata Penasehat KPK, Budi Santoso, di Denpasar, Jumat.

Pihaknya menambahkan, pembahasan kedua terkait dengan

data pengaduan masyarakat yang disampaikan hingga 31 Juli 2019 lalu, bahwa data yang dimiliki untuk Kota Denpasar, tentang total Laporan Pengaduan Masyarakat yang diterima KPK sebanyak 183 laporan dan terverifikasi.

“Hingga 31 Juli 2019, ya kira-kira setengah bulan yang lalu dari data yang kami miliki untuk Kota Denpasar, dengan total laporan pengaduan masyarakat yang diterima oleh KPK sebanyak 183 laporan dan semua sudah selesai diverifikasi,” ujarnya.

Untuk jumlah laporan setiap tahunnya apabila di rinci lagi, KPK menerima 50 laporan untuk tahun 2014, 32 laporan di tahun 2015, 31 laporan di tahun 2016, tahun 2017 menerima 23 laporan, tahun 2018 menerima 18 laporan dan di tahun 2019 menerima 29 laporan.

“Dari keseluruhan laporan tersebut, sebanyak 32 laporan diteruskan untuk ditelaah dan dikelompokkan sesuai deliknya, sedangkan untuk 151 laporan lainnya dimasukkan di dalam pen-

garsipan karena tidak memenuhi syarat-syarat dan kriteria yang ditetapkan oleh KPK sesuai perundangan dan regulasi dan SOP yang berlaku di KPK,” paparnya.

Budi mengatakan di tahun 2019, masuknya 29 laporan, 10 laporan diantaranya diteruskan untuk ditelaah lebih lanjut. Sedangkan untuk 19 laporan lainnya, dimasukkan di dalam pengarsipan karena tingkat kedelikan sebagai non-PPK atau bisa disebut non-tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana korupsi nya tidak memenuhi kriteria.

Laporan terbanyak selanjutnya dikelompokkan berdasarkan delik perbuatan melawan hukum menyalahgunakan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara sebanyak 50 laporan. Data terakhir yang juga disampaikan oleh Budi Santoso dalam sambutannya bahwa rata-rata Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Kota Denpasar, per 12 Agustus 2019 lalu, sekitar 98,84 persen. (ant)

Pemkot Denpasar-Marseille Jajaki Kerja Sama Pariwisata Budaya

Pemerintah Kota Denpasar, Bali mendapat kunjungan dari delegasi Kota Marseille, Perancis karena dinilai berhasil mengembangkan dan mengelola pariwisata budaya.

“Kedatangan saya ke Pemerintah Denpasar untuk bertemu dengan Wali Kota Dharmawijaya Rai Mantra guna menjalin kerja sama yang erat dengan Kota Denpasar mengenai pariwisata, seni budaya dan di bidang ekonomi kreatif,” kata Wakil Wali Kota Marseille Perancis Bidang Perhubungan International dan Mediteranian, Jean Roatta, saat bertatap muka dengan Wali Kota Denpasar Rai Dhamawijaya Mantra di Denpasar, Selasa.

Ia mengatakan antara Kota Denpasar dengan Kota Marseille banyak persamaan, untuk itu pihaknya ingin sekali mengadakan kerja sama tersebut.

Selain itu, kata dia, penerbangan maskapai Turkish Air-

line langsung dari Marseille-Bandara Ngurah Rai, Bali melalui Istanbul telah ada sejak bulan Juli 2019.

“Saya sangat mengapresiasi Wali Kota Denpasar yang masih menjaga keberadaan tempat-tempat bersejarah ‘heritage’ serta cagar budaya yang ada di Denpasar dan bisa menjadikan sebagai salah satu destinasi wisata Kota Denpasar. Karena kalau hanya menonjolkan keindahan alam, masih banyak tempat-tempat indah di belahan dunia ini. Untuk itu saya sangat tertarik dengan ‘culture tourism’ di Denpasar,” ucapnya.

Jean Roatta lebih lanjut mengatakan ingin melakukan pertukaran budaya Kota Denpasar dan ingin mengundang Denpasar untuk menampilkan kebudayaan dan kesenian saat parade festival di Marseille.

Sementara Wali Kota Rai Mantra menyambut baik ke-



Pemkot Denpasar-Kota Marseille jajaki kerja sama budaya. (Antaraneews Bali/Komang Suparta/IST/2019)

datangan Wakil Wali Kota Marseille untuk menjalin kerja sama dengan Pemkot Denpasar khususnya di bidang pariwisata budaya. Karena banyak sekali tempat-tempat bersejarah di Denpasar bisa dikunjungi oleh tamu mancanegara yang dapat dijadikan wisata budaya.

“Saya sangat senang kalau bisa menjalin kerja sama di bidang pariwisata budaya dengan

Pemerintah Marseille dan langkah baiknya selain pariwisata budaya, bisa terjadinya kolaborasi budaya antara Denpasar dengan Marseille,” katanya.

Ia juga mengundang Pemerintah Marseille untuk bisa hadir di dalam ‘Denpasar Festival’ pada akhir tahun ini untuk ikut berkolaborasi menampilkan kesenian budaya Marseille di ‘Denfest 2019’. (ant)

Pembangunan Balai Budaya “Giri Nata Mandala” Sudah Tahap Akhir



Bupati Badung Nyoman Giri Prasta (kelima kiri) bersama Wabup Ketut Suiasa (keenam kiri) dan Kadis PUPR Badung IB. Surya Suamba (keempat kiri) berfoto saat meninjau proyek fisik Balai Budaya Giri Nata Mandala, Kamis (29/8). *AntaraneWS Bali/Fikri Yusuf*

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mengemukakan pembangunan Balai Budaya “Giri Nata Mandala” di Kabupaten Badung, Bali, yang berada di kawasan Pusat Pemerintahan Badung, telah memasuki tahap akhir.

“Pembangunan gedung balai budaya ini telah memasuki tahap finishing. Berbagai piranti canggih seperti layar LED, sistem tata suara dan tata pencahayaan ber-

standar internasional sudah terpasang,” ujar Bupati Badung saat meninjau perkembangan pembangunan proyek fisik Pemkab Badung di Mangupura, Kamis.

Ia mengatakan, gedung balai budaya berstandar internasional yang didesain mampu menampung 2.500 penonton itu rencananya akan diresmikan dan dilaksanakan upacara melaspas (upacara ritual penyucian) pada tanggal 14 September 2019.

“Untuk penggunaan awal nanti rencananya pada 26 Oktober mendatang dalam rangka kegiatan HUT Mangupura” kata Giri Prasta.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Badung IB Surya Suamba menjelaskan, pembangunan gedung balai budaya tersebut sudah selesai 100 persen yang dibangun dengan sentuhan budaya Bali, khususnya ornamen khas “Bebadungan”.

Saat ini, menurutnya, pengerjaan masih dilakukan dengan pemasangan interior yang ditargetkan selesai pada bulan September mendatang.

“Gedung ini akan dilengkapi sound sytem 3.000 watt merk dari Jerman dan lampu dari Italia. Gedung ini merupakan proyek multiyears dengan anggaran mencapai Rp336 miliar,” katanya.

Selain meninjau gedung ba-

lai budaya, rombongan Bupati Badung Giri Prasta didampingi Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa beserta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait juga meninjau dua proyek fisik lainnya di Badung.

Proyek tersebut adalah pembangunan gedung blok D, F dan G, Rumah Sakit Daerah Mangusada dan pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) di Desa Baha, Mengwi.

Pembangunan gedung Blok D, F dan G, RSD Mangusada sudah mulai dikerjakan sejak Desember tahun lalu dan ditargetkan rampung November Tahun 2020.

Proyek tersebut bersifat tahun jamak (multiyears) dengan nilai Rp232 miliar. Realisasi 22,003 persen, naik 2,364 persen dari rencana 19,639 persen. Gedung D rencananya akan digunakan untuk poliklinik dengan sistem cluster dan ruang rawat inap kelas II dan kelas I. (adv)

Kemenpan Tinjau Mal Pelayanan Publik Badung

Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB), Diah Natalisa, didampingi Kabid Evaluasi Pelayanan Publik Aris Samson meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Badung, Bali.

“Kami mengapresiasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badung karena walaupun baru setahun MPP Badung diresmikan, namun ini telah banyak memberikan layanan kepada masyarakat,” ujar Diah Natalisa di Badung, Kamis.

Kedatangan rombongan Kemenpan RB tersebut langsung disambut langsung Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat I Made Agus Aryawan dan Kabag Organisasi I Wayan Wijana.

Dalam kesempatan tersebut

Diah Natalisa meninjau pelayanan yang ada di Mall Pelayanan Publik Badung seperti Loker Garuda, Pos Indonesia, pengurusan IMB serta mengamati langsung proses pengurusan izin yang dilakukan oleh masyarakat Badung.

Menurutnya, dengan banyaknya instansi yang bergabung di MPP Badung, diharapkan kedepannya Pemkab Badung dapat membangun gedung baru dengan layanan “One Stop Service Area” yang menghadirkan layanan perizinan dan non-perizinan yang sudah bergabung di berbagai layanan seperti BUMN, BUMD bahkan layanan swasta.

“Saya berharap One Stop Service Area di Badung melalui MPP dapat menjadi percontohan, sehingga dapat menjadi kebanggaan Badung dan nantinya akan semakin banyak yang datang ke Badung untuk melihat, belajar dan mencontoh pelayanan yang



Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB Diah Natalisa didampingi Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Badung, Kamis. (Foto : *AntaraneWS/Fikri Yusuf/ist*)

ada disini,” jelasnya.

Diah Natalisa menambahkan, pihaknya juga berharap agar keberadaan Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Badung saat ini tidak hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat, tapi juga memberikan keramahan dengan mengedepankan hospitality dan kenyamanan.

Menanggapi hal tersebut

Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa mengatakan kedepannya pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan inovasi di Mall Pelayanan Publik.

Ia juga meminta seluruh jajarannya untuk terus meningkatkan motivasi dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan perizinan. (adv)

Pemkab Badung Miliki Layanan Perizinan “LAPERON” dan “OSS”



Wabup Badung, I Ketut Suiasa menyerahkan sertifikat saat meresmikan LAPERON dan OSS di Dinas PMPTSP Kabupaten Badung, Rabu (28/8). Antaranews Bali/istimewa

Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, memiliki pelayanan perizinan melalui Layanan Perizinan Online (LAPERON) dan Online Single Submission (OSS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) setempat.

“LAPERON merupakan aplikasi berbasis website dan aplikasi berbasis android yang

melayani 122 jenis perizinan dan non-perizinan daring yang menjadi kewenangan Pemkab Badung dan ditetapkan dengan Perbup Badung No. 11 tahun 2019,” ujar Kepala Dinas PMPTSP Badung, I Made Agus Aryawan, di Mangupura, Rabu.

Ia mengatakan, melalui aplikasi LAPERON, pihaknya berusaha memberikan kemudahan, kecepatan dan transparansi

dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan sehingga dapat terwujud tata kelola pelayanan publik yang baik, berkualitas serta memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan.

“Terwujudnya aplikasi ini atas kerja sama yang baik dengan tim ahli ITB STIKOM Bali sebagai pengembang sistem LAPERON dan dari dukungan semua pihak,” kata Agus Aryawan.

Ia menjelaskan, ada empat tujuan layanan LAPERON yaitu, kemudahan akses terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan, meningkatkan kecepatan, ketepatan dan transparansi dalam pelayanan perizinan.

Transformasi pola pelayanan dari pola konvensional menuju pola online dan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan perizinan di Badung.

Selain itu, LAPERON memi-

liki empat tipe layanan meliputi, pertama Layanan Mandiri, layanan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat melalui website www.laperon.badungkab.go.id.

Kedua, Layanan Berbantuan petugas pada Lounge Mal Pelayanan Publik, ketiga adalah Layanan Prioritas bagi pelaku usaha yang investasi langsung dengan pengawalan khusus dari awal sampai akhir proses dan keempat Layanan Jemput Bola ke tempat banjar/desa.

Agus Aryawan berharap, tersedianya aplikasi LAPERON mampu mendorong tumbuhnya investasi di Badung yang sepenuhnya berorientasi pada peningkatan iklim investasi yang kondusif, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta peningkatan daya saing daerah.

“Sehingga nantinya kami harapkan akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. (adv)

Wakil Wali Kota Marseille Kunjungi Badung

Wakil wali kota Marseille, Perancis, bidang Hubungan Internasional Jean Roatta, mengunjungi Kabupaten Badung, Bali, yang diterima langsung oleh Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa.

“Kehadiran kami di Badung ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan perwakilan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) asal Bali (I Kadek Arimbawa) ke Marseille pada bulan yang lalu, dimana hal ini tentu sangatlah penting untuk menata hubungan yang lebih baik ke depan, baik dari segi sosial, ekonomi dan kebudayaan,” ujar Jean Roatta, di Mangupura, Selasa.

Ia mengatakan, pihaknya berharap pertemuan tersebut nantinya dapat ditindak lanjuti, mengingat Marseille yang terletak di wilayah Perancis selatan memiliki karakteristik yang mirip dengan apa yang dimiliki oleh Kabupaten Badung dengan pantai dan lautnya.

Hal tersebut menurutnya sangat mungkin dilakukan apalagi dengan pembukaan jalur penerbangan baru maskapai penerbangan Turkish Airlines ke Bali yang dapat memperlancar kerja sama antara dua pemerintahan.

“Hal ini tentu merupakan langkah yang positif bagi nafas kepariwisataan Badung, Bali dan Marseille, Perancis di tahun depan,” katanya.

Selain dihadiri Jean Roatta, pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Indonesian France Chamber of Commerce and Industry Philippe Augier, anggota DPD RI asal Bali, I Kadek Arimbawa, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Badung, IBA. Yoga Segara serta Kadis Pariwisata, Badung, Made Badra.

Sementara itu, Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa mengatakan pihaknya sangat menyambut baik kunjungan dan kerja sama yang akan dilaksanakan apalagi yang berkaitan



Wabup Badung, I Ketut Suiasa saat menerima kunjungan Wakil Wali Kota Marseille Perancis, Jean Roatta di Puspem Badung, Selasa (27/8/2019). ANTARA/Fikri Yusuf/ist

dengan pengembangan industri kepariwisataan, bidang kebudayaan serta bidang pendidikan.

“Mengingat Kabupaten Badung dengan alamnya sangat mendukung kerja sama ini tentu menjadi sesuatu yang dapat memberikan nilai yang positif bagi masyarakat kami,” katanya.

Ia menjelaskan, hal tersebut sangat diharapkan dapat berjalan dengan baik karena Kabupaten Badung dan Bali

mengandalkan kehidupan dari sektor pariwisata dan saat ini telah menjadi salah satu tujuan utama kunjungan para wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

“Kami harap kunjungan ini akan menjadi awal yang baik untuk kehadiran para wisatawan dari Marseille, Perancis, di Kabupaten Badung dan Bali di tahun-tahun yang akan datang,” ujar Suiasa. (adv)

Badung-Batubara Sepakat Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah



Wabup Badung I Ketut Suiasa (kanan) dan Bupati Batubara, Zahir, berfoto bersama usai penandatanganan MoU di Puspem Badung, Bali, Selasa (27/8/2019). (ANTARA/Fikri Yusuf)

Pemerintahan Kabupaten Badung, Bali, bersama Pemerintah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara menandatangani kesepakatan bersama (MoU) tentang pembangunan antar daerah khususnya bidang peternakan dan pariwisata. “Kami menyambut baik

MoU dengan Pemkab Batubara ini yang kami harapkan akan saling menguntungkan bagi kedua daerah dalam membangun wilayahnya,” ujar Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, di Mangupura, Selasa.

Ia menjelaskan, pembangunan pariwisata sudah menjadi salah satu prioritas pembangunan di Badung berdasarkan Pola Pembangunan Semesta Berencana (PPNB).

“Dengan adanya penandatanganan MoU ini, diharapkan dapat membangun kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan di kedua daerah,” kata Wabup Suiasa.

Sementara terkait bidang peternakan, menurutnya hal tersebut juga menjadi atensi penting yang kedepannya akan terus ditingkatkan.

“Ini sudah menjadi komitmen dan program kami untuk

pengembangan bibit sapi bali di Badung. Kami menyambut baik kerjasama ini sebagai sebuah komitmen untuk membangun negeri dengan sinergitas antar daerah,” ujar Wabup Suiasa.

Sementara itu, Bupati Batubara, Zahir, menjelaskan, penandatanganan MoU dengan Pemkab Badung tersebut diharapkan dapat meningkatkan ilmu dan pembangunan di Kabupaten Batubara.

“Kami sangat tertarik belajar ke Badung, kami sangat mengagumi adanya laboratorium dan pengembangan peternakan sapi, termasuk kemajuan desa wisata di Badung,” ujarnya.

Zahir menambahkan, melalui MoU tersebut pihaknya akan meminta semacam pelatihan yang dilakukan dari Badung ke Batubara untuk kemajuan daerah Batubara. (adv)

Kejari Badung Jadi Contoh Pengurangan Sampah

Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, meresmikan dua role model nasional instansi vertikal di Kabupaten Badung, yaitu Kawasan Khusus Bebas Sampah dan Kantong Plastik serta Bank Sampah Mandiri Komunal di lingkungan Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung.

“Kami sangat mengapresiasi kepada jajaran komponen Adhyaksa Kejari Badung yang telah berkomitmen untuk menjaga kebersihan dengan pengurangan sampah dari sumbernya secara berkelanjutan,” ujar Sekda Badung, I Wayan Adi Arnawa, di Mangupura, Senin.

Ia mengatakan, jajaran Pemkab Badung memiliki harapan bahwa proyek percontohan tersebut nantinya dapat bergaung luas sebagai garda terdepan untuk mewujudkan Badung Bersih dan Hijau.

“Hal itu selaras dengan konsep Gerakan Serentak (GER-TAK) Badung Bersih yang sebelumnya telah dicanangkan oleh

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta pada 17 Juli yang lalu,” katanya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Badung, I Putu Eka Merthawan menjelaskan, kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Badung No. 47 tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

Selain itu, kegiatan itu juga selaras dengan Peraturan Bupati Badung No. 48 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah.

Menurutnya, keberhasilan Kejari Badung menjadi role model nasional tersebut patut disyukuri karena dapat terlaksana atas komitmen yang tinggi dari seluruh komponen Kejari Badung.

“Nantinya harapan kami, hal ini akan terus dapat ditularkan kepada instansi vertikal lainnya baik di Badung, Bali bahkan Indonesia,” kata Eka



Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa (keempat kiri) saat menghadiri peresmian dua role model nasional yaitu Kawasan Khusus Bebas Sampah dan Kantong Plastik serta Bank Sampah Mandiri Komunal di lingkungan Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung, Senin (26/8). Antaranews Bali/Fikri Yusuf

Merthawan.

Sementara itu, Kepala Kejari Badung, Sunarko, mengatakan, pihaknya menyambut baik kolaborasi antara Pemkab Badung khususnya DLHK setempat dengan komponen Kejari Badung untuk secara total mengurangi penggunaan kantong plastik serta menjadikan sampah menjadi bernilai melalui Bank sampah.

Ia menegaskan bahwa pihaknya siap mengawal komitmen

Bupati Badung dalam upaya mewujudkan konsep terintegrasi dan berkelanjutan melalui Gerakan Serentak Badung Bersih.

“Kami juga berkomitmen dalam penjabarannya nantinya akan membuat prosedur standar operasional khusus di internal Kejari Badung agar program ini dapat bermanfaat serta membantu mewujudkan Badung Bersih dan Hijau,” ujar Sunarko. (adv)

Aplikasi “iBadung” Atasi Kekurangan Buku di Sekolah



Kadiskerpus Badung Ni Wayan Kristiani saat Sosialisasi Perpustakaan Digital dan Braille Corner untuk pengawasan Kepala Sekolah Dasar, Pengelolaan Perpustakaan se-Badung, Senin (26/8). Antaranews Bali/istimewa

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung, Bali, Ni Wayan Kristiani mengatakan, aplikasi perpustakaan digital “iBadung” siap mengatasi permasalahan kekurangan buku yang terjadi di sekolah.

“Aplikasi iBadung telah diluncurkan mulai September tahun lalu. Kami targetkan dalam jangka waktu satu bulan ini ada 10 sekolah di tiap kecamatan yang terinstal,” kata Ni Wayan Kristiani di sela-sela Sosialisasi Perpustakaan Digital dan Braille

Corner untuk pengawasan Kepala Sekolah Dasar, Pengelolaan Perpustakaan se-Badung, di Mangupura, Senin.

Ia mengatakan, Perpustakaan Badung mempunyai 726 judul buku dengan 2.177 eksemplar dan juga sudah bekerjasama dengan BSE (buku sekolah elektronik).

“Kami mempunyai buku sekolah elektronik tingkat SD, SMP dan SMA. Itu fungsinya sama bisa diunduh gratis melalui aplikasi iBadung yang telah masuk atau ditanamkan ke laptop siswa, sehingga anak-anak bebas meminjam buku sekolah elektronik tersebut dari laptop,” katanya.

Ia menambahkan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Badung juga memiliki program untuk memasukkan Perpustakaan Digitali Badung ke laptop siswa kelas 5 dan 6 seko-

lah dasar.

Selain itu, inovasi tersebut juga dapat diakses menggunakan ponsel pintar milik siswa. Terobosan tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat maupun para pelajar mengetahui perpustakaan atau membaca buku melalui ponsel pintar.

Terkait kegiatan Sosialisasi Perpustakaan Digital dan Braille Corner untuk pengawasan Kepala Sekolah Dasar, Pengelolaan Perpustakaan se-Badung, ia menjelaskan bahwa kegiatan itu sudah berjalan sejak beberapa waktu lalu di kecamatan Mengwi, kecamatan Petang dan Abiansemal.

“Sedangkan hari ini kegiatan dihadiri oleh Pengawas serta Kepala Sekolah SD dan Pengelola Perpustakaan di tiga Kecamatan yaitu, Kuta Utara, Kuta dan Kuta Selatan,” kata Wayan Kristiani. (adv)

Badung Raih Penghargaan Tanggap Narkoba Dari BNN

Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, dan BNN setempat meraih penghargaan tanggap narkoba dari BNN RI atas keberhasilannya dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

“Kami dengan kebijakan dan kepedulian terhadap bahaya narkoba telah melaksanakan langkah-langkah positif kepada masyarakat seperti dengan memberikan sosialisasi tentang bahaya narkoba,” ujar Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, saat Seminar Nasional Tanggap Ancaman Narkoba, di Mangupura, Kamis.

Penghargaan tersebut, diberikan BNN RI kepada Badung sebagai Kabupaten yang bersinergi dan berkontribusi aktif dalam pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) tanggap darurat ancaman narkoba di Indonesia.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Sekretaris BNN

Pusat Adhi Prawoto yang diterima oleh Wabup I Ketut Suiasa dan Kepala BNN Badung, Ni Ketut Masmini.

Wabup Suiasa menjelaskan, bahaya narkoba merupakan ancaman serius yang dapat merusak tatanan kehidupan baik secara psikologis maupun secara materi.

“Hal tersebut harus ditangani secara serius dan bersama-sama mulai dari keluarga, lingkungan dan pergaulan,” kata Suiasa.

Ia menambahkan, pihaknya juga terus melakukan berbagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba salah satunya dengan melakukan tes urin terhadap seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memastikan ASN di Pemerintah Kabupaten Badung tidak terlibat narkoba.

Selain itu, ia menambahkan, Pemkab. Badung juga telah membentuk KSPAN (Kelompok Siswa Peduli Aids dan Narkoba) di seluruh sekolah di



Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa (kedua kanan) menerima penghargaan dari BNN RI. Antaranews Bali/Humas Badung/fjk

Kabupaten Badung.

“Kami disini tidak saja ingin memberi contoh tapi harus menjadi contoh bagi mereka untuk membangun Badung yang kuat dan berkualitas. Penggunaan Narkoba sekarang ini sudah tidak melihat dan mengenal golongan sosial,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris BNN RI, Adhi Prawoto, mengatakan, penyalahgunaan nar-

koba telah menjadi ancaman yang serius di Indonesia.

Pihaknya mengajak berbagai lembaga dan seluruh pemerintah baik provinsi dan kabupaten/kota agar terus intens dan aktif dalam mensosialisasikan bahaya pemakaian dan peredaran narkoba kepada semua kalangan baik mahasiswa, pelajar dan seluruh masyarakat sesuai dengan Inpres Nomor 6 tahun 2018. (adv)

DPRD Badung Diminta Bekerja Sesuai Aturan



Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta (tengah) menghadiri Rapat Paripurna pengambilan sumpah janji Ketua dan Wakil Ketua DPRD Badung periode 2019-2024, di ruang Utama Gosana, Kantor DPRD, Puspem Badung, Kamis (22/8). Antaranews Bali/Fikri Yusufist

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mengajak seluruh jajaran pimpinan dan anggota DPRD Badung untuk bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Saya mengajak DPRD untuk melaksanakan tugas sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat tugas pokok dan fungsi.

Ada legislasi, budgeting dan fungsi kontrol. Sekaligus memegang teguh sumpah janji jabatan ini, “ujarnya saat menghadiri Rapat Paripurna Pengambilan Sumpah Janji Ketua dan Wakil Ketua DPRD Badung periode 2019-2024, di Mangupura, Kamis.

Ia mengatakan, pihaknya mengucapkan selamat atas ter-

laksananya acara pengambilan sumpah dan janji Pimpinan DPRD Badung. Melalui pengukuhan itu diharapkan pimpinan dan anggota DPRD dapat berbuat yang terbaik untuk Badung, Bali.

“Kami ingin para pimpinan dan anggota legislatif dapat mewujudkan Badung yang sampilik, saguluk, salunglung, lan sabayantaka atau dapat bersatu, saling menghargai pendapat orang lain dan saling mengingatkan, saling menyayangi, saling tolong-menolong,” katanya.

Selain itu, Bupati Giri Prasta meminta Badan Kehormatan DPRD untuk menjalankan kode etik agar ada evaluasi dari DPRD.

“Sekarang tidak ada yang kecil dikalahkan oleh yang besar. Yang ada adalah yang lambat dikalahkan oleh yang cepat,” kata Giri Prasta.

Dalam pengukuhan dan pengambilan sumpah janji Pimpinan DPRD Badung itu, DPRD

Badung kembali dipimpin oleh Ketua I Putu Parwata Melia Kusuma serta Wakil Ketua I Wayan Suyasa dan I Made Sunarta.

Sementara itu, Ketua DPRD Badung, Putu Parwata mengatakan, ke depannya pihaknya dituntut tugas dan tanggung jawab yang cukup berat untuk memajukan Kabupaten Badung.

“Ini bukanlah semata-mata hanya jabatan yang kami inginkan, tapi adalah kerja keras tegak lurus untuk membangun Badung yang kami cintai ini,” kata Parwata.

Menurutnya, sebagai pemerintahan bersama, pihaknya harus memiliki tanggung jawab yang tinggi, bagaimana dapat berfikir sehat, melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab kepada masyarakat Badung.

“Mari bangun Kabupaten Badung dengan integritas yang kuat penuh loyalitas dan tanggung jawab kepada masyarakat,” ujar Putu Parwata. (adv)

Pemkab Badung - Ditjen Pajak Optimalisasi Pendapatan

Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa melakukan penandatanganan nota kesepahaman terkait dengan optimalisasi pendapatan melalui pajak daerah dan aset daerah dengan disaksikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Panjaitan.

Dalam keterangan Humas Badung yang diterima ANTARA di Mangupura, Kamis. Wabup Suiasa menandatangani tiga kesepakatan, yaitu dengan Kanwil Dirjen Pajak Bali, Kantor Pertanahan Nasional Badung, dan PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

Penandatanganan nota kesepahaman itu, dilakukan di Ruang Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali dan diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Provinsi Bali.

Wabup Suiasa menjelaskan kesepakatan yang dilakukan, yaitu dengan Kanwil Dirjen

Pajak Bali tentang pelayanan publik dan optimalisasi penerimaan pajak pusat dan pajak daerah di Badung, dengan Kantor Pertanahan Nasional Badung tentang kerja sama pelayanan urusan pertanahan di Badung,

Kesepakatan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Bali terkait dengan penggunaan produk dan jasa perbankan.

Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pihaknya mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut rapat-rapat yang telah diinisiasi pihak Korsupgah atau Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK Republik Indonesia.

“Optimalisasi pendapatan daerah dan barang milik daerah dapat terwujud apabila ada sinergitas antarinstansi di Provinsi Bali, baik antara



Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menandatangani MoU terkait optimalisasi pendapatan melalui pajak daerah dan aset daerah di Ruang Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali. Antaranews Bali/Humas Badung/fjk

pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota se-Bali dengan instansi vertikal yang ada di Provinsi Bali,” katanya.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan berharap, seluruh kepala daerah di Provinsi Bali dapat melaksanakan apa yang sesuai dengan yang ditanandatangani dalam nota kesepahaman.

Menurut dia, hal tersebut penting dalam rangka mengoptimalkan pendapatan pajak daerah dan agar kepala daerah memiliki kepedulian terhadap kekayaan yang dimilikinya.

“Tim pencegahan selalu berada di sini mendampingi mereka. Setiap saat kalau ada kendala mereka yang akan menyelesaikan. Itu tujuan pertemuan kami ini,” ujar dia. (adv)

BI Bali: Pengembangan “QRIS” Usung Semangat “Unggul”



Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho (AntaraneWS Bali/Dok BI Provinsi Bali/2019)

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali telah melaksanakan peluncuran “Quick Response Code Indonesia Standard/QRIS” sebagai suatu standar QR Code sistem pembayaran Indonesia dengan mengusung semangat “Unggul”.

“QRIS merupakan salah satu implementasi dari visi sistem pembayaran Indonesia (SPI) 2025 yang memerlukan dukungan inovasi teknologi bagi pengembangan ekonomi dan keuangan digital,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia

Provinsi Bali Trisno Nugroho, di Denpasar, Rabu.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali meluncurkan QRIS bertepatan dengan upacara peringatan HUT ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus lalu. Peluncurannya disaksikan seluruh perwakilan perbankan di wilayah Bali dan ditandai dengan transaksi oleh seluruh pegawai Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali untuk pemberian donasi sosial.

“Pengembangan QRIS dapat

digunakan untuk pembayaran melalui aplikasi uang elektronik server based, dompet elektronik atau mobile banking,” ucapnya.

Sedangkan mengenai pengembangan QRIS yang mengusung semangat “UNGGUL” merupakan akronim dari Universal, GampanG, Untung dan Langsung.

“Universal” yang berarti penggunaan QRIS bersifat inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat dan dapat digunakan untuk transaksi pembayaran di domestik dan luar negeri.

Kemudian “GampanG” yang berarti masyarakat dapat bertransaksi dengan mudah dan aman dalam satu genggaman ponsel. Kemudian “Untung” yang berarti transaksi dengan QRIS menguntungkan pembeli dan penjual karena transaksi berlangsung efisien melalui satu kode QR yang dapat digunakan untuk semua aplikasi pembayaran pada ponsel.

Yang terakhir “Langsung” yang berarti transaksi dengan QRIS langsung terjadi, karena prosesnya cepat dan seketika sehingga mendukung kelancaran

sistem pembayaran.

Trisno menambahkan, QRIS disusun dan dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dengan menggunakan standar internasional EMV Co.1 untuk mendukung interkoneksi instrumen sistem pembayaran yang lebih luas dan mengakomodasi kebutuhan spesifik negara sehingga memudahkan interoperabilitas antarpemangku, antar-instrumen, termasuk antarnegara.

“Untuk tahap awal, QRIS fokus pada penerapan QR Code Payment model Merchant Presented Mode (MPM), yakni penjual (merchant) yang akan menampilkan QR Code pembayaran untuk dipindai oleh pembeli ketika melakukan transaksi pembayaran,” kata Trisno.

Sebelum siap diluncurkan, kata Trisno, spesifikasi teknis standar QR Code dan interkoneksinya telah melewati uji coba pada tahap pertama pada bulan September hingga November 2018 dan tahap kedua pada bulan April hingga Mei 2019. (ant)

Desa Siakin-Bangli Miliki “Tower” Telkomsel

Masyarakat Desa Siakin dan sekitarnya di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, kini dapat menikmati layanan telekomunikasi dengan memiliki “tower” (menara telekomunikasi) Telkomsel yang telah diresmikan GM ICT Operation Telkomsel Regional Bali Nusra, Henry Ganda Purba, bersama Bupati Bangli, I Made Gianyar, dan Direktur PT Sanjiwani Karya Mandiri, Ni Made Suarsi, Rabu (14/8).

“Peresmian ‘tower’ ini merupakan salah satu wujud konsistensi dan kepedulian kami bersama pemerintah setempat akan kebutuhan masyarakat terhadap layanan komunikasi dan informasi,” kata GM ICT Operation Telkomsel Regional Bali Nusra, Henry Ganda Purba, dalam ket-

erangan pers yang diterima di Denpasar, Selasa.

Untuk itu, pihaknya akan selalu berupaya memperkuat jaringan yang ada di Desa Siakin agar bisa sejajar dengan daerah lainnya yang dilengkapi oleh jaringan internet yang berkualitas dan memadai, sehingga Desa Siakin siap menjadi desa yang Go Digital serta “Bersama Telkomsel Turut Mengakselerasi Negeri”.

Pada kesempatan itu, Bupati Bangli Made Gianyar menyampaikan apresiasi kepada PT Telkomsel dan PT Sanjiwani atas perannya dalam membantu masyarakat Desa Siakin dan sekitarnya dalam percepatan akses komunikasi yang saat ini dirasakan masyarakat setempat.



Sinergi PT Telkomsel, Bupati Bangli, dan PT Sanjiwani dalam membantu masyarakat Desa Siakin dan sekitarnya dalam percepatan akses komunikasi yang berkualitas dan memadai (Foto AntaraneWS Bali/HO-Humas Telkomsel Bali-Nusra/2019)

“Dengan berdirinya tower di Desa Siakin akan mempercepat akses komunikasi, koordinasi dan informasi, serta secara tidak langsung juga dapat menghidupkan perekonomian ma-

sarakat, yang akan berimbas pada percepatan pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah Desa Siakin,” kata Bupati sebagaimana dikutip dalam ket-

Menteri Eko Puji Pertanian Berbasis Pariwisata di Tabanan



Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, (kanan) disambut Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti (kiri) pada kunjungan dalam rangka Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Shiny pada lima kecamatan di Kabupaten Tabanan, Kamis (22/8). (Foto Antaranews Bali/Pande Yudha/2019)

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, memuji kawasan pertanian berbasis pariwisata di Kabupaten Tabanan, Bali, karena perpaduan pariwisata dengan pertanian secara inovatif akan mendorong munculnya desa yang maju.

“Saya yakin Tabanan bisa lebih maju, sehingga ada desa

maju baru di Tabanan. Pariwisata memang paling cepat mendapatkan pendapatan bagi desa,” katanya dalam kunjungan ke Banjar Dinas Singin, Selemadeg, Tabanan, Bali, Kamis.

Dalam kunjungan dalam rangka Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Shiny pada lima kecamatan di Kabupaten Tabanan, yang di-

dampingi Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti, Menteri menjelaskan hal terpenting untuk kawasan itu adalah kawasan yang bebas dari sampah plastik.

“Kalau bisa Ibu buat Perda melarang sampah plastik, itu komitmen yang bagus. Tanpa komitmen dari kita, maka akan sulit pariwisata kita berkembang. Jangan sampai karena sampah plastik, kita diboikot oleh negara lain,” katanya.

Kedatangan Menteri Eko di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional SHINY tersebut juga sekaligus dalam rangka penyerahan 9 item bantuan di Kecamatan Selemadeg, Selemadeg Barat dan Pupuan, untuk mendorong produksi ekonomi agar memiliki nilai tambah dengan memadukan sektor hulu dan hilir, memperkuat posisi tawar terhadap pasar, serta mencegah kompetisi tidak sehat antardesa.

Dalam kesempatan itu, Bupati Eka menjelaskan Tabanan merupakan lumbung pangan

bagi Bali, sehingga Tabanan sangat getol membangun sektor pertanian.

Dengan alam yang mendukung, memungkinkan Tabanan membangun sektor pertanian berbasis pariwisata.

“Kami bersyukur mempunyai alam yang kaya. Dengan mengembangkan pembangunan dari pinggiran melalui tools kawasan perdesaan, maka akan mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat dan meningkatkan kualitas pembangunan serta pemberdayaan untuk peningkatan kapasitas masyarakat,” katanya.

Apalagi, Tabanan memiliki petani, nelayan dan juga ada peternak. “Dari itulah, kami membentuk BUMDes di Kabupaten Tabanan. Dengan tujuan bisa menampung, dan memasarkan produk-produk lokal yang merupakan produksi dari masyarakat Tabanan,” katanya. (ant)

Menaker Kunjungi Kelompok Tenaga Kerja Mandiri di Gianyar



Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri juga tak canggung ketika duduk berbaur bersama para perajin. (Foto Humas Gianyar)

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengunjungi kelompok Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Mulia Mandiri, Banjar Panglan Desa Pejeng, Gianyar, yang bergerak di bidang kerajinan patung kayu.

“Hari ini memang saya berkunjung ke Gianyar ini, khususnya di Desa Pejeng. Ini untuk melihat usaha kelompok di Desa Pejeng ini yang mereka ini mem-

buat souvenir-souvenir berbahan kayu,” kata Hanif Dhakiri, di Gianyar, Senin.

Rombongan diterima Wakil Bupati Gianyar, A A Gde Mayun bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar, I Made Gede Wisnu Wijaya.

Sesampainya di lokasi, Hanif Dhakiri langsung meninjau proses pembuatan souvenir berupa ikan hias, kepala kuda,

kura-kura yang semuanya berbahan kayu.

Kesempatan itu juga digunakan untuk berdialog langsung dengan para perajin. Bahkan, Hanif Dhakiri juga tak canggung ketika duduk berbaur bersama para perajin.

Dikatakan, kunjungan ini sekaligus untuk mencari tahu secara langsung tentang kendala dan permasalahan yang selama ini dihadapi oleh para perajin. Baik dari segi peralatan maupun segi tatakelola pemasaran hasil kerajinan.

“Saya sudah minta kepada jajaran saya, untuk mengidentifikasi kebutuhan alatnya apa saja”, tambah Hanif Dhakiri.

Meski demikian, menteri berharap pekerjaan-pekerjaan yang masih bisa dikerjakan secara manual, lebih baik tetap dikerjakan secara manual karena juga dapat mendukung program padat karya dengan melibatkan

anggota-anggota kelompok yang lebih banyak.

Ketua TKM Mulia Mandiri, I Wayan Danu mengatakan kerajinan souvenir berbahan kayu tersebut telah ditekuni kelompoknya sejak tahun 1993 yang beranggotakan sekitar 20 orang.

“Setiap harinya, kelompok ini mampu menghasilkan produk kerajinan sekitar 50 biji. Dalam hal pengerjaan kerajinan tersebut, selama ini masih dilakukan secara manual dari proses awal hingga pada tahapan penyelesaian akhir,” katanya.

Sementara Kelian Dinas Banjar Panglan, I Made Kamardiana mengatakan, warganya memang sebagian besar bekerja di bidang kerajinan, baik kerajinan kayu maupun bangunan bergaya Bali. Pekerjaan sebagai perajin kayu tersebut merupakan mata pencaharian nomor dua warganya setelah sebagai tukang bangunan bergaya Bali. (ant)

Pemkab Karangasem Adakan Upacara “Sisya Upanayana”



Pemkab Karangasem gelar upacara “Sisya Upanayana”. (Antaranews Bali/Komang Suparta/2019)

Pemkab Karangasem, Bali, mengadakan upacara “Sisya Upanayana” di depan Pura Padmasana Kantor Bupati Karangasem guna menguatkan slogan Kabupaten Karangasem yakni “Karangasem The Spirit Of Bali” dengan tujuan membersihkan, mempertajam pikiran, memperhalus budi pekerti siswa agar mampu lebih cepat menyerap ilmu pengetahuan dan kecerdasan spiritual.

Keterangan pers dari Hu-

mas Pemkab Karangasem yang diterima, Senin, melaporkan kegiatan “Upacara Sisya Upanayana” (mewinten massal) yang diikuti siswa siswi SMP dan SMA/SMK se-Kabupaten Karangasem itu disinkronkan dengan Upacara Piodalan di Pura Padmasana Kantor Bupati Karangasem yang dihadiri Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri, Prof Dr. Ida Bagus Yuda Triguna selaku pemberi Darmawacana terkait Upacara Sisya Upanayana.

Dalam upacara yang dipuput oleh lima sulinggih yakni Ida Pedanda Gede Jelantik, Ida Pedanda Gede Putra, Ida Pedanda Gde Meranggi Dwi Putra Keniken, Pedanda Gde Darma Putra Manuabe dan Ida Pedanda Gde Kertha Yoga itu, Kadisdikpora Karangasem I Gusti Ngurah Kartika mengatakan bahwa tujuan dari upacara “Sisya Upanayana” adalah untuk menjalankan visi dan misi Bupati Karangasem untuk menjadikan Karangasem menjadi cerdas, bersih dan bermartabat berdasarkan Tri Hita Karana.

Selain itu juga untuk memohon kepada Sang Hyang Widhi Wasa supaya para siswa diberikan jalan yang lancar dalam proses menerima pembelajaran. “Peserta dalam upacara sisya upanayana berjumlah 1.000 orang dari jenjang SMP, SMA/SMK,” ucap Gusti Ngurah Kartika dalam upacara yang juga dihadiri Para Kepala OPD beserta staf itu.

Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri dalam sambutannya menyatakan apresiasi dan terimakasih kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan instansi yang lainnya yang sudah berkontribusi dalam acara ini.

Upacara “Sisya Upanayana” yang dilaksanakan sekarang mempunyai tujuan yang sangat utama dikarenakan kegiatan ini akan menjadi dasar untuk para siswa dalam mengikuti proses belajar di sekolah.

“Selain itu upacara ini juga bertujuan untuk memohon kepada Ida Sang hyang Widhi Wasa agar diberikan kekuatan lahir dan batin untuk menjalankan proses belajar sebagai murid,” imbuhnya.

Mas Sumatri juga mengatakan, kegiatan upacara ini diharapkan agar siswa bisa bakti kepada guru serta bisa mengikuti semua aturan yang sudah ada di sekolah dan juga selalu mengikuti nasehat nasehat yang diberikan oleh para guru. (ant)

Wabup Bangli Tekankan Pentingnya UKS Bagi Sekolah-Masyarakat

Wakil Bupati (Wabup) Bangli Sang Nyoman Sedana Arta mengatakan selama ini usaha kesehatan sekolah (UKS) telah memiliki peranan yang penting dalam membentuk kesadaran peserta didik di sekolah untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungannya.

“Oleh karenanya, program UKS harus menjadi perhatian bersama, mulai dari tim pembina UKS, instansi pemerintah, kepala sekolah, guru, peserta didik dan masyarakat,” katanya di Bangli, Rabu.

Ia berpendapat jika semua orang memiliki pandangan yang sama maka UKS akan menjadi program strategis dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Hal ini dikatakan Wabup Sedana Arta, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi guru Pembina UKS se- Kabupaten Bangli, di ruang pertemuan Kantor Camat Bangli.

Ia mengatakan keberhasilan

pembinaan dan pengembangan program UKS, terlihat dan tercermin pada perilaku hidup bersih dan sehat peserta didik di sekolah. Hal ini merupakan dampak dari pembinaan dan pelaksanaan program UKS di semua jenjang pendidikan, mulai dari tingkat TK, SD, SMP dan SMA.

Pada kesempatan itu, Wabup Sedana Arta juga mengingatkan, menjaga kesehatan di lingkungan sekolah bukan hanya pada perbaikan fisik sekolah saja, namun lebih menekankan kepada perubahan perilaku warga sekolah untuk mendukung program UKS.

Oleh karenanya, melalui kegiatan bimtek ini, Wabup Sedana Arta berharap, kompetensi guru Pembina UKS dapat terus ditingkatkan serta diharapkan muncul terobosan baru agar UKS bisa menjadi kebutuhan bersama.

“Melalui bimtek ini, saya berharap guru pembina bisa meningkatkan kompetensinya dalam



Wabup Bangli Sedana Arta, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi guru Pembina UKS se- Kabupaten Bangli (Foto Humas Bangli)

melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS di masing-masing sekolah, “harapnya.

Melalui gerakan nyata, Wabup Sedana Arta juga berharap tim pembina dan pelaksana UKS mampu menjaga, mempertahankan dan mengembangkan program UKS yang kreatif dan inovatif, dengan menggali kearifan lokal untuk mewujudkan sekolah yang sehat dan mandiri.

Sementara itu ketua panitia

penyelenggara Jero Penyarikan A Widata dalam laporannya menyampaikan, tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi guru pembina UKS sebagai tim pelaksana UKS di sekolah dalam memahami informasi tentang sekolah sehat serta meningkatkan pengetahuan guru pembina dalam menyusun program, melaksanakan program, mengadministrasikan dan membuat laporan TPUKS. (ant)

Industri Batok Kelapa Wakili Klungkung ke Tingkat Nasional

Usaha industri dengan bahan batok kelapa di Banjar Sarimertha Negari, Kecamatan Banjarangkan, mewakili Kabupaten Klungkung, Bali, untuk maju ke Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) Unggulan Tingkat Nasional Tahun 2019. Sebelumnya, industri batok kelapa ini sudah masuk ke 10 besar dalam Lomba Inovasi TTG Unggulan Tingkat Nasional Tahun 2019.

Terkait lomba tersebut, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menyambut kedatangan tim verifikasi lapangan Lomba Inovasi TTG Unggulan Tingkat Nasional Tahun 2019, yang dipimpin Kepala Subdirektorat Teknologi Tepat Guna (Kasubdit TTG) Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Anastutik Wiryaningsih, di Banjarangkan, Klungkung, Jumat.

Dalam pertemuan di tempat usaha Yande Batok di Desa Negari, Banjarangkan, yang juga dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK serta Ketua Dekranasda Kabupaten Klungkung Nyonya Ayu

Suwirta itu, pemilik usaha I Gede Suryawan memaparkan sejarah terbentuknya usaha menggunakan batok kelapa, alat dan bahan teknologi yang digunakan dalam mengolah industri tersebut.

Ia mengatakan jumlah produksi sebelum menggunakan teknologi tepat guna yakni lima produk setiap hari untuk setiap pekerja, dibandingkan saat ini yang sudah menggunakan teknologi tepat guna telah dapat mencapai 100 produk perhari untuk setiap pekerja.

“Tingkat kegagalan sebelum menggunakan teknologi tepat guna adalah 50 persen dengan varian produk 1 varian, sedangkan ketika menggunakan teknologi tepat guna, tingkat kegagalan menjadi 5 persen dengan varian produk 50 jenis,” katanya.

Sementara itu, Kepala Subdit TTG Ditjen PPMD Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Anastutik Wiryaningsih mengatakan, teknologi tepat guna tidak harus mahal, tapi lebih kepada teknologi yang dapat bermanfaat dan memecahkan permasalahan yang ada disekitar tempat industri ber-



Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta bersama Kepala Subdirektorat Teknologi Tepat Guna (TTG) Ditjen PPMD Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Anastutik Wiryaningsih, saat mendatangi lokasi produk industri batok kelapa yang merupakan mewakili Klungkung dalam lomba tingkat nasional, Jumat (23/8). (Antaraneews Bali/HO-Humas Klungkung/2019)

sangkutan.

“Teknologi tepat guna dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat dan ilmu yang diperoleh dapat dijadikan motivasi kepada masyarakat sekitar untuk menjadi mandiri. Dibalik penggunaan teknologi tepat guna, para pengusaha dapat memberikan pelatihan serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar,” katanya.

Ia mengungkapkan, kedatangan tim verifikator bertujuan memotret dan mencari informasi secara riil dilapangan terkait pro-

fil dari peserta yang mengikuti perlombaan ini, yang akan dipresentasikan tim kepada para juri pada akhir bulan Agustus.

Dalam kesempatan itu, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta mengatakan pelaku usaha jangan malu belajar dengan para pengusaha yang sudah sukses, sehingga pemerintah memudahkan dalam melakukan ATM (Amati, Tiru, Modifikasi) terhadap kesuksesan yang diraih oleh para pengusaha, baik dari segi proses dari nol hingga menjadi sukses. (ant)

Pemkab Klungkung Buka Pasar Tani

Pemerintah Kabupaten Klungkung, Bali membuka pasar tani untuk memotong mata rantai pemasaran produksi pertanian, dengan harapan nilai jual hasil tani lebih tinggi.

“Pasar tani di kawasan CFD ini memudahkan konsumen untuk berbelanja. Setelah melakukan kegiatan olah raga, masyarakat bisa memilih kebutuhan sehari-hari, ataupun beberapa produk pertanian untuk mempercantik halaman rumah,” kata Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, saat meninjau pasar tersebut usai melakukan CFD di Lapangan Puputan, Minggu (25/8) yang siaran persnya diterima Senin.

Sementara Kepala Dinas Pertanian Ida Bagus Juanida mengatakan, Pasar Tani mulai dige-

lar Minggu, dan akan diadakan setiap minggunya.

Menurut dia, Pasar Tani ini diikuti pelaku usaha dan kelompok usaha UKM yang dipusatkan di depan Pendopo Puri Agung Klungkung, dengan tujuan untuk memotong mata rantai pemasaran produksi hasil pertanian, sehingga nilai produk pertanian yang dihasilkan petani menjadi lebih tinggi.

“Kami berharap lewat pasar tani ini, para petani dan konsumen bisa sama-sama mendapatkan keuntungan. Petani bisa menjual dengan harga yang baik, sedangkan konsumen mendapatkan harga yang lebih murah,” katanya.

Kelompok UKM yang berjualan di pasar tani ini terdiri dari berbagai kelompok diantaranya



Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta bercakap-cakap dengan pedagang, saat meninjau pasar tani yang bertujuan meningkatkan nilai jual produk pertanian, Minggu (25/8). (Antaraneews Bali/Humas Klungkung/2019)

KUD, Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA), Gapoktan, dan kelompok lainnya yang menjadi bagian dari UKM hasil pelatihan di Dinas Pertanian, Perdagangan, Koperasi, dan Ketahanan Pangan Pemkab Klungkung.

Berbagai produk produk tani asli hasil petani dengan kualitas baik seperti sayuran segar, buah-buahan dan beras serta berbagai hasil pertanian lainnya maupun usaha UMKM bisa dibeli dengan harga ekonomis. (ant)

Pegawai Pemkab Jembrana Diimbau Bijak Gunakan Media Sosial



Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan saat memimpin apel pegawai dan menekankan agar ASN menggunakan media sosial dengan bijaksana, Senin (26/8). (Antaraneews Bali/Humas Jembrana/2019)

Pegawai atau aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali diminta untuk menggunakan media sosial dengan bijaksana agar mendorong dan mendukung pembangunan.

“Saya mengajak dan mengimbau bapak ibu pegawai Pemkab, untuk menggunakan media sosial secara bijaksana dan cerdas. Gunakan media sosial untuk kemajuan dan perubahan, membangun branding serta citra positif pemerintah daerah,” kata Wakil Bupati Jembrana I Made Kem-

bang Hartawan saat memimpin apel rutin, di Negara, Senin.

Ia mengatakan, sinergi seluruh pegawai sangat dibutuhkan dalam menjaga citra pemerintah di era digital saat ini, karena citra institusi tidak terlepas dari citra personal di tempat bekerja.

Oleh karena itu, katanya, menjaga citra pemerintah menjadi tanggung jawab bersama, mulai dari pimpinan tertinggi sampai staf terbawah.

Ia menyebut, teknologi informasi di era digital sekarang ini seperti pisau bermata dua, yang

apabila digunakan dengan tepat akan berdampak positif, namun apabila salah menggunakannya akan berakibat fatal, termasuk menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap personal maupun institusi.

Menurutnya, dukungan dari ASN bisa dilakukan dengan menjadi pribadi bijaksana dalam berinteraksi di media sosial dengan cara tidak memposting hal-hal yang merugikan institusi, memposting saat galau atau emosi dan membagikan informasi yang belum jelas atau salah.

“Terlebih lagi kegiatan yang tidak tepat itu diposting saat jam kantor berlangsung dengan masih menggunakan seragam pegawai. Penilaian masyarakat pasti akan berbeda,” katanya.

Hal-hal seperti itu disebutnya lebih banyak negatif daripada manfaat positif yang bisa diambil, apalagi jejak digital seseorang di media sosial sangat mudah terpantau.

iberbagai perusahaan, katanya, mulai merekrut karyawan dengan melihat akun media sosial sebagai seleksi awal dengan

tujuan mengetahui karakter calon karyawannya.

“Jadi mulailah dari sekarang menggunakan media sosial dengan bijaksana. Kalaupun ada yang sudah terlanjur, segera hapus dan hentikan. Lebih baik dukung pemerintah daerah dengan mensosialisasikan program dan kebijakan melalui media sosial masing-masing. Itu lebih bermanfaat,” katanya.

Diakhir pengarahannya, ia mengatakan, pentingnya strategi branding pemerintah di era digital, karena branding tidak hanya dibutuhkan oleh perusahaan besar saja, namun lingkup pemerintah juga harus memahaminya.

Menurutnya, strategi branding yang tepat akan membentuk citra yang baik, sekaligus memposisikan diri agar dikenal masyarakat.

“Kita sudah punya beberapa saluran media komunikasi digital yang harus dimanfaatkan. Ada website pemerintah, video-tron, sosial media resmi, tinggal dimaksimalkan. Ujungnya nanti untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” katanya. (ant)

Pameran Kerajinan Jembrana Catat Transaksi Rp1 Miliar

Selama sepuluh hari, pameran kerajinan di Kabupaten Jembrana, Bali, dalam rangka perayaan HUT Kota Negara ke 124 mencatat transaksi senilai Rp1,7 miliar, atau mengalami kenaikan 40 persen dibandingkan dengan pameran tahun sebelumnya.

“Nilai transaksi ini naik 40 persen lebih dibandingkan pameran yang sama tahun sebelumnya. Pantauan kami kunjungan masyarakat maupun pembeli dalam pameran kerajinan ini cukup ramai setiap hari,” kata Kepala Dinas Perdagangan Dan Koperasi Jembrana I Komang Agus Adinata, di Jembrana, Rabu.

Menurut dia, selain kerajinan, pameran ini juga menyuguhkan berbagai kuliner khususnya yang khas Kabupaten

Jembrana, lengkap dengan tata cara memasaknya.

Meski pameran terjadi peningkatan transaksi dalam pameran tahun ini, ia tetap melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap perajin lokal Jembrana agar terus meningkatkan kualitas dan kuantitas produksinya.

“Contohnya, setelah kami evaluasi selama pelaksanaan pameran ternyata perajin kita, terutama untuk di stand pakaian dan kuliner masih berorientasi menjual saja. Sejatinnya, pameran sebagai ajang promosi, sehingga seharusnya tiap peserta melengkapi lokasinya dengan identitas yang jelas, seperti kartu nama atau brosur terhadap usaha yang dilakoninya. Dengan identitas yang lengkap itu



Bupati Jembrana I Putu Artha (baju merah) saat membuka dan meninjau peserta pameran kerajinan, yang dalam waktu sepuluh hari membukukan transaksi Rp1,7 miliar. (Antaraneews Bali/Gembong Ismadi/2019)

konsumen tidak hanya akan bertransaksi saat pameran, tapi juga di luar waktu pameran,” katanya.

Kepada pelaku usaha di

Jembrana, ia juga menekankan pentingnya inovasi serta promosi agar mampu bersaing di pasaran, baik lokal maupun nasional. (ant)

Jalan Pintas Titik 5-6 Singaraja-Mengwitani Tuntas November Ini



Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Jalan Baru Batas Kota Singaraja Mengwitani, Ketut Payun Astapa, bersama Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, saat memantau lokasi proyek shortcut Singaraja-Mengwitani pada titik 5-6 di lokasi proyek setempat (20/8). (Foto Antaranews Bali/Made Adnyana/2019)

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Jalan Baru Batas Kota Singaraja Mengwitani, Ketut Payun Astapa, menegaskan bahwa pembangunan "shortcut" (jalan baru batas kota) Singaraja-Mengwitani pada titik 5 dan 6 sudah mencapai 70 persen, sehingga ditargetkan akan tuntas pada awal November 2019.

"Seluruh pihak membantu sehingga progres yang dicapai

sudah plus 2 persen atau sudah mencapai 70 persen secara keseluruhan. Dengan percepatan ini, akhir Oktober atau awal November 2019, maka jalan titik 5 dan 6 bisa dibuka," kata Ketut Payun Astapa saat memantau lokasi proyek itu sebagaimana keterangan pers dari Humas Pemkab Buleleng yang diterima, Rabu.

Saat memantau proyek itu bersama Bupati Buleleng Putu

Agus Suradnyana (20/8), ia menjelaskan pembangunan ini terus dipantau oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR), khususnya Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bali Nusra.

"Setiap permasalahan terus dikordinasikan dan dikomunikasikan," katanya.

Untuk keuangan sendiri, ia mengatakan realisasi sudah mencapai 60 persen dari kontrak yang bernilai Rp140 miliar lebih. Pada akhir Agustus 2019, sesuai dengan kemajuan perkembangan pembangunan sampai di angka 70 persen.

Pihak rekanan ingin menarik 10 persen lagi, namun pihak Kemen-PUPR tetap menilai apakah sudah layak penarikan termin tersebut atau tidak.

"Realisasi anggaran sudah sampai 60 persen saat ini. Kita juga terus melakukan penilaian dari Kemen-PUPR untuk penarikan termin oleh rekanan," ujar

Payun Astapa.

Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana mengatakan, berdasarkan pemaparan yang dilakukan sebelum peninjauan, progress sudah + 2 persen, namun ada juga yang progress sampai minus, bahkan pembangunan jembatan sudah mencapai + 7-8 persen.

"Yang minus adalah pembuat jalan zona 3, karena permukaan tanahnya memang tinggi. Tentu dari progres ini, saya berharap bulan November 2019 shortcut titik 5 dan 6 ini sudah bisa dibuka," ungkapnya.

Bupati menambahkan dari informasi yang diperoleh, shortcut titik 7 dan 8 sudah mulai proses tender. Ia pun kembali mengharapkan agar proyek tersebut cepat terlaksana. Hasil komunikasi dengan Gubernur Bali, Wayan Koster, jika memungkinkan tahun depan titik 7,8,9,10 sekaligus dikerjakan.

Hal tersebut sudah menjadi komitmen dari Gubernur Wayan Koster. (ant)

Pemkab Kampanyekan Songket Buleleng

Pemkab Buleleng, Bali, mengkampanyekan songket khas dari kabupaten setempat yang dimulai saat upacara peresmian pengangkatan anggota DPRD Buleleng masa bakti 2019-2024 pada 15 Agustus lalu.

"Saat itu, pimpinan SKPD laki-laki menggunakan saput dan udeng songket, sedangkan pimpinan SKPD yang perempuan menggunakan kamen songket," kata Kabag Humas dan Protokol Buleleng, Ketut Suwarmawan, di Singaraja, Buleleng, Selasa.

Ia menjelaskan penggunaan kain songket Buleleng dalam balutan pakaian adat pada acara pelantikan Anggota DPRD Buleleng itu merupakan instruksi langsung dari Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana.

"Itu dilakukan untuk menghidupkan kembali kejayaan songket Buleleng. Selain itu, instruksi tersebut dikeluarkan karena melihat Presiden Jokowi saat kunjungan ke Bali pada acara

Kongres PDIP pada awal Agustus lalu menggunakan kain songket Buleleng, tepatnya kain songket dari Jinengdalem," katanya.

Menurut dia, songket merupakan kebanggaan Kabupaten Buleleng. "Kebanyakan daerah di luar Buleleng, bahkan beberapa di luar Bali, sudah mengenal songket Khas Buleleng sehingga kita sebagai orang Buleleng perlu untuk melestarikan," katanya.

Dengan penggunaan kain songket Buleleng ini, ia mengharapkan masyarakat semakin mengenal kain tenun khas Buleleng itu. "Dengan demikian, produksi kain tenun Songket Buleleng semakin meningkat, dan mampu memberikan dampak ekonomi yang baik bagi para pengrajin," katanya.

Humas Buleleng melaporkan kain songket yang digunakan oleh sejumlah pimpinan SKPD saat pelantikan DPRD pada 15 Agustus itu berasal dari berbagai sentra kerajinan di Buleleng.



Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana (kiri) mengkampanyekan songket khas Buleleng saat upacara peresmian pengangkatan anggota DPRD Buleleng masa bakti 2019-2024 pada 15 Agustus 2019. (Foto Antaranews Bali/Made Adnyana/2019)

"Mulai dari songket dengan motif klasik dari Beratan, songket bahan alam dari Sinabun, sampai dengan songket dengan motif modern dari Jinengdalem, bahkan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng sendiri tampak kompak memakai saput dan udeng songket yang berbahan alam dari sentra tenun di Sinabun," katanya.

Salah satu Kepala SKPD, Gede Sugiarta Widiada, mengungkapkan rasa bangganya meng-

gunakan Songket Buleleng. Jenis kain songket yang dipakainya adalah kain songket dari Joanyar.

"Ini merupakan aksi nyata untuk meningkatkan perekonomian melalui pemberdayaan kain songket, termasuk melakukan pelestarian kain khas Buleleng. Saya pakai yang dari Joanyar. Ini aksi nyata untuk produk Buleleng. Saya sangat bangga. Apalagi sempat digunakan oleh Presiden RI," katanya. (ant)